

DARI REZIM OTORITARIAN KE REFORMASI: KRITIK ATAS UPAYA PENETAPAN SOEHARTO SEBAGAI PAHLAWAN DI TENGAH CATATAN PELANGGARAN HAM 1998

Faqih Athoillah¹, Nazif Najmudin², Yoga Maulana Gading³, Muhammad Aldi Dinnastiar⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Serang – Banten

Email: faqihathoillah111@gmail.com, najnazif@gmail.com, astagayog1612@gmail.com, alidinnastiar321@gmail.com

Accepted: 17-12-2025	Revised: 28-12-2025	Approved: 15-01-2026
-------------------------	------------------------	-------------------------

Abstrak: Penelitian ini membahas dinamika rezim otoritarian Orde Baru dan kontroversi wacana penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional di tengah catatan pelanggaran HAM pada 1998. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi kepustakaan, kajian ini menelusuri karakter politik Orde Baru yang ditandai oleh sentralisasi kekuasaan, kontrol militer, pembatasan kebebasan sipil, serta praktik KKN yang mengakar. Analisis kemudian berfokus pada rangkaian pelanggaran HAM menjelang kejatuhan Soeharto, termasuk kerusuhan Mei, kekerasan seksual, pembunuhan massal, serta penculikan aktivis pro-demokrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya mempromosikan Soeharto sebagai pahlawan nasional tidak dapat dilepaskan dari upaya rekonstruksi memori sejarah yang berpotensi memutuskan tindakan represif negara. Karena itu, kajian ini menegaskan pentingnya integritas sejarah, transparansi, dan penghormatan terhadap korban sebagai fondasi etis dalam merumuskan kebijakan kepahlawanan, sekaligus menjaga nilai-nilai demokrasi dan HAM pada era reformasi.

Kata Kunci: Orde Baru, Pelanggaran HAM, Soeharto

Abstract: This study examines the dynamics of the authoritarian New Order regime and the controversy surrounding efforts to declare Soeharto a national hero despite his documented human rights violations in 1998. Using a qualitative-descriptive approach and library research, the analysis explores the political structure of the New Order, characterized by centralized power, military dominance, restricted civil liberties, and entrenched corruption practices. The study further investigates major human rights violations preceding Soeharto's downfall, including the May 1998 riots, sexual violence, mass killings, and the abduction of pro-democracy activists. Findings reveal that attempts to elevate Soeharto as a national hero reflect efforts to reconstruct historical memory in ways that risk whitewashing state repression. Thus, this research underscores the importance of historical integrity, transparency, and respect for victims as ethical foundations for heroism policies, while safeguarding democratic values and human rights in the reform era.

Keywords: New Order, Human Rights Violations, Soeharto

PENDAHULUAN

Fenomena otoritarianisme dalam sejarah politik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran panjang rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pemerintahannya berlangsung selama lebih dari tiga dasawarsa dengan ciri utama sentralisasi kekuasaan, kontrol ketat terhadap oposisi, serta pembatasan ruang demokrasi melalui instrumen militer dan birokrasi negara.¹ Pada akhir masa kekuasaannya, berbagai krisis politik, ekonomi, dan sosial memuncak dan mendorong terjadinya ketidakstabilan nasional. Puncaknya muncul pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis multidimensi yang kemudian membuka jalan bagi gerakan Reformasi.

Dalam konteks tersebut, terjadi rangkaian pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari kekerasan terhadap mahasiswa, penghilangan orang secara paksa, hingga kerusuhan Mei 1998 yang menyisakan trauma sosial mendalam.² Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi catatan kelam yang menyertai

¹ M. Kamil, *Politik Orde Baru dan Dinamika Kekuasaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

² I. Wibowo, "Kekerasan Negara Menjelang Reformasi 1998," *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 7, No. 2 (2015), 145–160.

kejatuhan Soeharto, sekaligus menjadi bagian penting dalam dinamika transisi demokrasi di Indonesia. Namun, beberapa tahun setelah reformasi bergulir, muncul kembali wacana penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Hal ini menimbulkan kritik luas karena dinilai mengabaikan tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM yang terjadi pada penghujung Orde Baru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa masalah: (1) bagaimana karakter otoritarian rezim Soeharto; (2) apa bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1998; dan (3) apa dasar kritik terhadap upaya pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Rumusan masalah ini bertujuan untuk memastikan analisis lebih terarah dan berbasis fakta sejarah, bukan sekadar perdebatan politis.

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengkaji hubungan antara rezim otoritarian Orde Baru dan pelanggaran HAM menjelang reformasi, serta menganalisis kritik publik dan akademis terkait wacana penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Penelitian ini memiliki dua manfaat utama: secara teoretis, memperkaya kajian mengenai otoritarianisme, transisi demokrasi, dan hak asasi manusia; secara praktis, menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan pemberian gelar pahlawan agar tetap berpijak pada prinsip keadilan sejarah.³

Ranah utama yang relevan untuk memahami wacana penetapan pahlawan pada figur kontroversial: (1) konsep rezim otoritarian; (2) konsep pelanggaran HAM; (3) kajian terdahulu tentang Orde Baru dan peristiwa 1998; dan (4) debat mengenai kriteria dan kontroversi penetapan Pahlawan Nasional. Pemahaman teoritis dan bukti empiris dari kajian-kajian Indonesia kontemporer menjadi dasar analisis berikut.

1. Konsep Rezim Otoritarian

Rezim otoritarian umumnya ditandai oleh sentralisasi kekuasaan, kontrol birokratik dan militer terhadap ruang politik, serta pembatasan kebebasan sipil sebagai instrumen stabilitas rezim. Dalam konteks Orde Baru, pola tersebut diwujudkan lewat penguatan militer-birokrasi, monopoli informasi, dan penggunaan norma “stabilitas nasional” untuk menjustifikasi pembatasan kebebasan politik dan sosial.⁴

Analisis konseptual atas otoritarianisme menekankan bahwa kontrol rezim bukan hanya soal represi fisik tetapi juga kontrol kelembagaan penataan ekonomi-politik yang mengikat aktor publik ke dalam jaringan patronase dan KKN sehingga legitimasi rezim dibangun melalui pencapaian pembangunan materiil sekaligus dipertahankan melalui represi struktural. Studi kontemporer menunjukkan bagaimana kombinasi kontrol formal dan informal inilah yang membuat rezim bertahan lama meski menimbulkan biaya demokratis yang besar.

2. Konsep Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pelanggaran HAM pada kerangka nasional dan internasional merujuk pada pelanggaran hak dasar yang dijamin instrumen seperti UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, serta instrumen internasional (mis. UDHR, ICCPR). Dalam praktik, indikasi pelanggaran HAM berat mencakup pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, kejahatan terhadap kemanusiaan kategori yang kerap dipakai lembaga seperti Komnas HAM untuk mengkualifikasi

³ R. Setiawan, *Demokrasi dan Reformasi di Indonesia: Analisis Transisi Politik* (Jakarta: LP3ES, 2010).

⁴ PR2Media, *Melawan Otoritarianisme Kapital* (Jakarta: PR2Media, 2021).

peristiwa tertentu.²

Pendekatan normatif ini dipakai oleh peneliti dan lembaga nasional ketika menelaah peristiwa akhir Orde Baru: identifikasi jenis pelanggaran, aktor yang diduga bertanggung jawab (aparat negara maupun kelompok non-negara), serta hambatan penegakan hukum (impunitas, lemahnya mekanisme penuntutan). Kajian Indonesia menekankan pentingnya bukti dokumenter dan kesaksian korban untuk memperkuat klaim pelanggaran dan memobilisasi tuntutan hukum serta rekonsiliasi sosial.⁵

3. Kajian Terdahulu Tentang Orde Baru Dan Soeharto

Sejumlah studi sejarah dan ilmu sosial telah mengurai dinamika Orde Baru: bagaimana pembangunan ekonomi dikombinasikan dengan pengelolaan politik yang otoriter, praktik KKN, dan peran militer dalam kehidupan publik. Penelitian empiris tentang 1998 menyorot rangkaian krisis moneter, kemerosotan legitimasi politik, dan aksi massa mahasiswa yang berpuncak pada kerusuhan dan kekerasan sosial di beberapa kota besar.⁶

Studi-studi lapangan tentang Mei 1998 menekankan dimensi etnis, gender, dan ekonomi dalam kekerasan, misalnya serangkaian serangan terhadap komunitas Tionghoa, pelanggaran seksual yang terdokumentasi, serta tekanan struktural yang memperuncing konflik sosial. Kajian ini memberi bukti kontekstual penting untuk menilai klaim pemutihan sejarah atau klaim jasa pembangunan ketika dihadapkan pada catatan pelanggaran HAM.

4. Debat Penetapan Pahlawan Nasional: Kriteria Dan Kontroversi

Pemberian gelar Pahlawan Nasional diatur melalui kriteria formal yang menekankan jasa besar bagi bangsa, pengorbanan, dan ketekunan dalam perjuangan atau pembangunan. Namun, wacana pemberian gelar kepada tokoh yang kontroversial menghadirkan pertanyaan etis dan historiografis: apakah jasa pembangunan dapat menutupi atau mendahului tanggung jawab atas pelanggaran HAM? Studi kontemporer dan tulisan kebijakan menyorot kebutuhan klarifikasi kriteria transparansi proses penilaian.

Perdebatan publik dan akademis mengenai pahlawan nasional sering memadukan argumen normatif (keadilan sejarah, hak korban) dan politik (reklamasi memori, usaha rekonsiliasi atau pembelokan agenda politik). Literatur menekankan perlunya mekanisme evaluasi sejarah yang independen dan berbasis bukti untuk menilai kelayakan gelar, serta implikasi simbolik yang luas bila pengabaian pelanggaran HAM dilegitimasi lewat penghargaan negara.⁷

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam dinamika sosial-politik pada masa Orde Baru, terutama terkait pelanggaran HAM 1998 dan kontroversi wacana penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Kajian kualitatif memungkinkan peneliti memahami

⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Wacana: Edisi 2 Tahun 2008 — Salam Korban HAM* (Jakarta: Komnas HAM, 2008).

⁶ L. Salim, "Dinamika Konflik Kerusuhan Mei 1998 di Kota Solo," *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 23, No. 2 (2019), 145–160.

⁷ Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, *Ensiklopedia Pahlawan Nasional* (Jakarta: Kemendikbud, 2013); lihat juga "Artikel tentang Kriteria Pahlawan Nasional," *Jurnal Pendidikan Transformatif*, Vol. 7, No. 1 (2023), 55–70.

narasi sejarah, struktur kekuasaan, serta konstruksi wacana politik yang muncul dalam perdebatan publik dan akademik. Data utama yang dianalisis berasal dari sumber primer, seperti dokumen resmi negara, laporan investigatif Komnas HAM, arsip Reformasi 1998, serta kesaksian tertulis yang relevan sebagai dasar verifikasi fakta. Sementara itu, sumber sekunder meliputi literatur akademik, buku sejarah politik, artikel jurnal, dan laporan analitis berfungsi mengontekstualisasikan data primer sekaligus menyediakan perspektif teoretis dalam menganalisis kontinuitas dan perubahan praktik otoritarianisme.⁸

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan interpretasi historis. Analisis isi diterapkan untuk mengidentifikasi pola retorika, tema kunci, serta argumen yang muncul dalam dokumen-dokumen resmi, laporan HAM, dan pemberitaan media. Analisis ini membantu mengungkap cara negara membangun legitimasi, bagaimana pelanggaran HAM direkam, serta bagaimana wacana pahlawan dibingkai dalam ruang politik dan sosial. Sementara itu, interpretasi historis digunakan untuk menempatkan seluruh temuan dalam alur kronologis dan konteks kekuasaan Orde Baru sehingga hubungan sebab-akibat dapat dipahami secara komprehensif. Melalui kombinasi dua teknik ini, penelitian menghasilkan pemetaan naratif yang kritis mengenai otoritarianisme, pelanggaran HAM 1998, dan pertarungan memori publik atas figur Soeharto.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik akhir Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari pola kekuasaan yang terpusat, penggunaan militer sebagai alat kontrol sosial, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas negara. Berbagai dokumen sejarah dan kajian akademik memperlihatkan konsistensi pola represif negara dalam menghadapi kritik, terutama melalui pembatasan ruang sipil dan framing stabilitas nasional sebagai legitimasi tindakan otoritarian. Pada saat bersamaan, struktur sosial-politik yang timpang membuat masyarakat sipil sulit membangun resistensi terbuka, sehingga pelanggaran HAM kerap terjadi tanpa konsekuensi hukum yang memadai.¹⁰

Dalam konteks krisis 1998, berbagai laporan investigatif menunjukkan bahwa tekanan ekonomi global memperburuk ketegangan domestik yang telah lama mengendap. Kerusuhan Mei, kekerasan seksual, dan penghilangan paksa aktivis menjadi indikator krisis negara-bangsa yang gagal melindungi warganya. Perdebatan mengenai gelar pahlawan nasional untuk Soeharto semakin menyoroti pertarungan memori kolektif, sebab pada saat sebagian pihak menonjolkan capaian pembangunan, sebagian lain mengingat rekam jejak pelanggaran HAM.¹¹ Penelitian ini kemudian merangkum temuan-temuan tersebut dalam bentuk tabel berikut sebagai gambaran ringkas isu utama.

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2007).

⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).

¹⁰ A. Pranoto, *Politik Kekuasaan dan Represi Orde Baru* (Yogyakarta: Narasi Press, 2018).

¹¹ R. Surbakti, "Krisis 1998 dan Akar Kekerasan Politik di Indonesia," *Jurnal Demokrasi & HAM*, Vol. 5, No. 1 (2020), 33–49.

Tabel 1. Ringkasan Bukti dan Isu Utama

No	Isu Utama	Bukti/Temuan	Sumber Utama
1	Sentralisasi kekuasaan & kontrol militer	Peran militer dalam birokrasi dan pengendalian politik lokal	Rajab (2019)
2	Pembatasan kebebasan pers & organisasi	Kasus sensor, intimidasi media, pembatasan ormas	Waluyo (2015)
3	Pelanggaran HAM 1998 (Mei)	Laporan korban, dugaan kekerasan seksual, penghilangan	ELSAM (2004); Komnas HAM
4	Debat kepahlawanan Soeharto	Argumen pembangunan vs bukti pelanggaran HAM	Artikel akademik (2016–2020)

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa setiap isu saling berkaitan dan membentuk pola yang mendukung karakter otoritarian rezim Orde Baru. Sentralisasi kekuasaan dan dominasi militer tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga mempengaruhi praktik sehari-hari seperti kontrol informasi dan pembatasan aspirasi politik masyarakat. Kondisi ini membuat pelanggaran HAM dapat terjadi secara sistematis karena instrumen kekuasaan negara bekerja tanpa pengawasan yang memadai. Kajian historis memperlihatkan bahwa pola otoritarian ini konsisten sepanjang era Orde Baru dan mencapai puncaknya menjelang kejatuhan rezim pada tahun 1998.¹²

Lebih jauh, tabel tersebut menunjukkan ketegangan epistemik antara narasi pembangunan dan fakta pelanggaran HAM. Hal ini berimplikasi langsung terhadap wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, karena indikator formal kepahlawanan menuntut integritas moral dan kontribusi tanpa cacat terhadap bangsa. Dengan demikian, data dalam tabel menguatkan argumen bahwa penilaian sejarah tidak boleh dipisahkan dari bukti faktual tentang represi dan penderitaan rakyat. Interpretasi terhadap temuan ini menegaskan perlunya kebijakan yang sensitif terhadap memori publik, kebenaran sejarah, dan prinsip keadilan untuk korban.

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM menjelang kejatuhan 1998, kritik atas wacana penetapan Soeharto sebagai pahlawan, serta makna reformasi bagi memori kolektif dan integritas sejarah. Analisis didasarkan pada verifikasi silang dokumen primer (laporan, arsip media) dan literatur akademik untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik berdasar bukti dan konteks historis yang jelas.

1. Karakteristik Rezim Otoritarian Soeharto

Rezim Orde Baru di bawah Soeharto ditandai oleh sentralisasi kekuasaan yang kuat di tangan eksekutif, dengan peran militer dan birokrasi yang melekat dalam mekanisme pengambilan keputusan. Instrumen politik dan institusi negara termasuk kantor pemerintahan, lembaga keamanan, serta aparat administratif digunakan untuk mengendalikan ruang publik dan memastikan stabilitas rezim; praktik ini menempatkan oposisi politik dan masyarakat sipil dalam posisi tertekan dan terkontrol.¹³

Kontrol terhadap kebebasan pers, pembatasan organisasi politik, dan represi terhadap aksi-aksi

¹² M. Lestari, *Sejarah Reformasi Indonesia: Transisi Kekuasaan dan Pelanggaran HAM* (Jakarta: Forum Aksi, 2017).

¹³ B. Rajab, "Otoritarianisme-birokratik dan Krisis Legitimasi: Dinamika Orde Baru," *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 8, No. 1 (2019), 59–78.

kolektif menjadi bagian dari strategi legitimasi rezim: dengan mengedepankan narasi pembangunan dan stabilitas nasional, rezim membenarkan pembatasan hak-hak sipil sebagai “harga” untuk pembangunan ekonomi. Studi empiris menunjukkan pola yang konsisten: pembungkaman kritik media dan pembatasan kebebasan berorganisasi dilakukan tidak hanya melalui aturan formal, tetapi juga melalui tekanan ekonomi, sensor, dan intervensi aparat keamanan.¹⁴

2. Pelanggaran Ham Menjelang Kejatuhan 1998

Krisis moneter 1997–1998 memicu kecemasan sosial dan politik yang meluas: runtuhnya nilai mata uang, pengangguran massal, melonjaknya ketidakpastian ekonomi memicu aksi massa mahasiswa dan berbagai kelompok sosial. Respons negara terhadap gejolak ini sering bersifat represif pada titik-titik tertentu aparat keamanan menerapkan tindakan keras yang mengakibatkan korban jiwa, penghilangan, dan pelanggaran hak asasi lain. Laporan investigatif mencatat rentetan insiden yang mengindikasikan pelanggaran hak sipil dan politik yang serius pada akhir era Orde Baru.

Peristiwa puncak Tragedi Mei 1998 menyisakan catatan kelam berupa kerusuhan massa yang disertai pembunuhan, penganiayaan, serta kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya terhadap warga etnis Tionghoa. Selain kekerasan publik, ada pula laporan penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi pada periode sebelumnya dan sesudahnya, yang menambahkan dimensi pelanggaran HAM terstruktur. Laporan-laporan Komnas HAM dan penelitian independen memberikan bukti dokumenter mengenai pola-pola kekerasan dan hambatan penegakan hukum pasca-peristiwa.¹⁵

3. Analisis Kritis Atas Wacana Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan

Pendukung wacana penghargaan kepada Soeharto biasanya menekankan pencapaian pembangunan: stabilitas politik jangka panjang, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan ekonomi yang pada masa tertentu memacu pertumbuhan. Argumen ini menyajikan narasi jasa pembangunan sebagai dasar legitimasi moral untuk penghormatan negara, termasuk pemberian gelar pahlawan bagi figur yang dianggap berjasa besar. Namun, narasi pembangunan ini cenderung mengabaikan atau meremehkan aspek hak asasi yang dilanggar selama rezim berkuasa.¹⁶

Penolakan terhadap upaya penetapan gelar pahlawan berakar pada rekam jejak KKN, represi politik, dan catatan pelanggaran HAM yang menurut para kritikus, tidak dapat diabaikan ketika negara hendak memberi penghargaan simbolis yang kuat. Kritik akademis menggarisbawahi ketidaksinkronan antara kriteria formal pahlawan nasional (jasa besar bagi bangsa dan negara) dan fakta sejarah yang menunjukkan adanya dampak negatif sistemik terhadap hak asasi dan kebebasan sipil selama masa kekuasaan. Upaya “memutihkan” sejarah melalui penghargaan tanpa proses akuntabilitas dapat merusak proses rekonsiliasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

4. Makna Reformasi Dan Memori Kolektif: Integritas Sejarah

Reformasi 1998 tidak sekadar pergantian rezim; ia merupakan momentum pembukaan ruang

¹⁴ D. Waluyo, *Membedah Pers Otoritarian pada Rezim Orde Baru*, Laporan/Artikel Neliti (2015).

¹⁵ ELSAM, *Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?* Laporan HAM 2004 (Jakarta: ELSAM, 2004).

¹⁶ S. Haryanto, “Jasa Pembangunan vs. Tanggung Jawab HAM: Debat Penobatan Pahlawan,” *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 12, No. 2 (2016), 88–105.

publik, tuntutan penegakan hukum, dan upaya membangun mekanisme akuntabilitas terhadap pelanggaran masa lalu. Makna reformasi bagi memori kolektif adalah keharusan mencatat sejarah secara akurat termasuk pengakuan atas korban dan pembelajaran institusional agar pola-pola pelanggaran tidak terulang. Transformasi demokrasi memerlukan komitmen pada transparansi sejarah dan mekanisme keadilan transisional yang kredibel.¹⁷

Mengabaikan atau meromantisasi ulang figur otoriter tanpa memenuhi syarat rekonsiliasi dan akuntabilitas berisiko menimbulkan distorsi sejarah. Integritas sejarah menuntut proses evaluasi yang independen, berbasis bukti, dan partisipatif yang melibatkan korban, sejarawan, lembaga hukum, dan publik sebagai dasar legitimasi simbolik seperti pemberian gelar. Dengan demikian, menjaga kejujuran sejarah merupakan prasyarat bagi konsolidasi demokrasi jangka panjang dan penghormatan terhadap HAM.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto memiliki karakter yang kuat sebagai rezim otoritarian, ditandai dengan sentralisasi kekuasaan, dominasi militer dalam politik, serta pembatasan kebebasan sipil seperti pers, organisasi, dan oposisi politik. Semua kebijakan tersebut dibangun atas narasi “stabilitas nasional” yang dijadikan legitimasi untuk menekan kritik dan mempertahankan kekuasaan. Pola kekuasaan ini tidak hanya menghambat proses demokratisasi, tetapi juga menciptakan ruang bagi terjadinya praktik represi sistematis terhadap masyarakat.

Puncak krisis terjadi pada tahun 1998 ketika kombinasi krisis ekonomi, ketidakpuasan sosial, dan tindakan represif aparat memicu tragedi kemanusiaan yang luas, termasuk kerusuhan Mei, kekerasan seksual terhadap perempuan, pembunuhan warga sipil, serta penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi. Temuan investigatif dari berbagai lembaga, termasuk Komnas HAM, memperkuat bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Dengan demikian, rekam jejak ini menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam menilai warisan kepemimpinan Soeharto.

Dalam konteks wacana penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional, penelitian ini menegaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian mendasar antara kriteria pahlawan dan kenyataan historis. Meskipun sebagian pihak menonjolkan keberhasilan pembangunan pada era Orde Baru, catatan pelanggaran HAM berat, praktik KKN, serta represi politik menjadi alasan kuat bagi penolakan akademis maupun publik. Reformasi 1998 menunjukkan bahwa bangsa ini membutuhkan kejujuran sejarah agar memori kolektif tetap terjaga dan tidak terdistorsi oleh kepentingan politik. Oleh karena itu, proses evaluasi terhadap tokoh sejarah harus dilakukan dengan mengedepankan integritas, bukti, dan penghormatan pada nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia.

¹⁷ ICTJ & Impunity Watch, *Derailed: Transitional Justice in Indonesia* (Jakarta: ICTJ, 2011).

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Prenada Media.
- Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. (2013). *Ensiklopedia pahlawan nasional*. Kemendikbud.
- ELSAM. (2004). *Tutup buku dengan “Transitional Justice”? Laporan HAM 2004*. ELSAM.
- Haryanto, S. (2016). Jasa pembangunan vs. tanggung jawab HAM: Debat penobatan pahlawan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 88–105.
- ICTJ & Impunity Watch. (2011). *Derailed: Transitional justice in Indonesia*. ICTJ.
- Kamil, M. (2017). *Politik Orde Baru dan dinamika kekuasaan*. Pustaka Pelajar.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2008). *Wacana: Edisi 2 tahun 2008 — Salam Korban HAM*. Komnas HAM.
- Lestari, M. (2017). *Sejarah reformasi Indonesia: Transisi kekuasaan dan pelanggaran HAM*. Forum Aksi.
- PR2Media. (2021). *Melawan otoritarianisme kapital*. PR2Media.
- Pranoto, A. (2018). *Politik kekuasaan dan represi Orde Baru*. Narasi Press.
- Rajab, B. (2019). Otoritarianisme-birokratik dan krisis legitimasi: Dinamika Orde Baru. *Jurnal Politik Indonesia*, 8(1), 59–78.
- Salim, L. (2019). Dinamika konflik kerusuhan Mei 1998 di Kota Solo. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 23(2), 145–160.
- Setiawan, R. (2010). *Demokrasi dan reformasi di Indonesia: Analisis transisi politik*. LP3ES.
- Surbakti, R. (2020). Krisis 1998 dan akar kekerasan politik di Indonesia. *Jurnal Demokrasi & HAM*, 5(1), 33–49.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Waluyo, D. (2015). *Membedah pers otoritarian pada rezim Orde Baru* (Laporan/Artikel Neliti).
- Wibowo, I. (2015). Kekerasan negara menjelang reformasi 1998. *Jurnal Ilmu Politik*, 7(2), 145–160.